

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA
PALABUHAN RATU



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas karunia – Nya Laporan Kinerja (LKj) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu Triwulan I Tahun 2023 dapat diselesaikan. LKj PPN Palabuhanratu ini merupakan bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi PPN Palabuhanratu kepada publik dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

LKj PPN Palabuhanratu ini menggambarkan sejumlah capaian kinerja terhadap target sasaran yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang dilaporkan secara bertahap. LKj PPN Palabuhanratu Triwulan I Tahun 2023 ini disertai dengan data dukung capaian sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dalam pelaporan kinerja tahun 2023.

Menyadari bahwa Laporan ini masih jauh dari kesempurnaan dan harapan, untuk itu kritik dan saran dalam upaya penyempurnaan sangat kami harapkan agar laporan ini bermanfaat khususnya dalam pelaksanaan kegiatan berbasis kinerja untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan yang telah membantu dan turut serta dalam penyelesaian laporan ini semoga menjadi amal ibadah bagi kita semua, Aamiin.

Palabuhanratu, 12 April 2023

Kepala Pelabuhan Perikanan

Nusantara Palabuhanratu

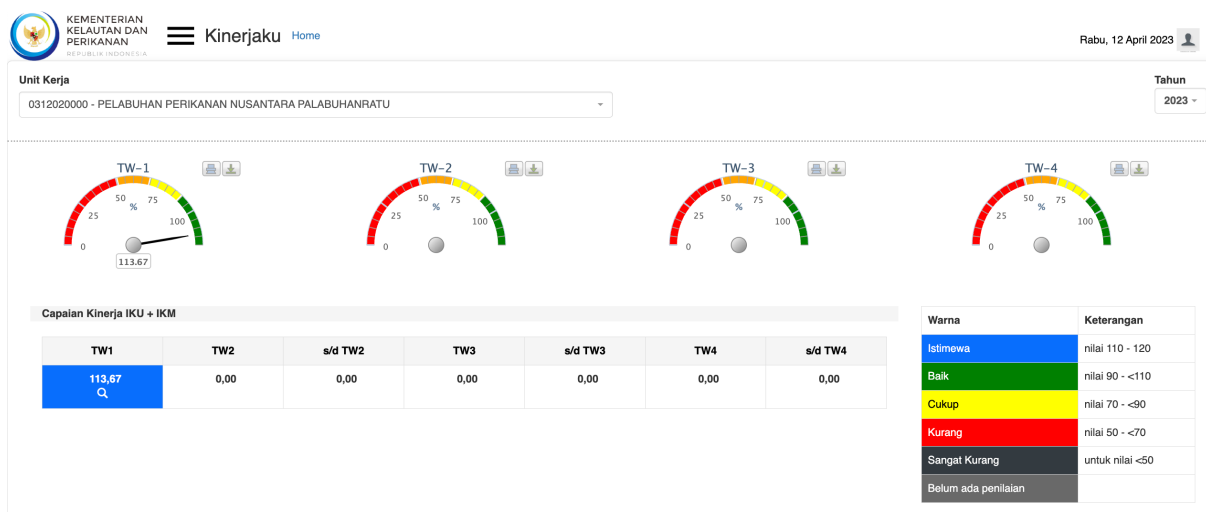


Yusuf Fathanah, S.Pi, M.Si

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) merupakan informasi tertulis yang menjelaskan tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di PPN Palabuhanratu Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 17.349.747.000,-. Dengan dukungan anggaran tersebut pada Triwulan I capaian pelaksanaan anggaran adalah sebesar Rp. 2.349.931.474,- atau 13,54% dari PAGU anggaran tahun 2023. Secara kinerja PPN Palabuhanratu mendapat total Nilai Pengukuran Sasasaran Strategis (NPSS) sebesar 113,67% sebagaimana *dashboard* dibawah ini:



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum	1
1.3 Kedudukan	2
1.4 Tugas dan Fungsi	3
1.5 Aspek Strategis	5
1.6 Sistematis Penyajian	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis PPN Palabuhanratu 2021 – 2024	8
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	9
2.3 Target Kinerja dan Anggaran	11
2.4 Rencana Aksi Penetapan Kinerja	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja	15
SS 1 Nilai PNPB Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan di PPN Palabuhanratu	17
SS 2 Produktivitas Perikanan Tangkap di PPN Palabuhanratu Meningkatkan.....	18
SS 3 Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berdaya Saing di PPN Palabuhanratu	19
SS 4 Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/ Terlindungi di PPN Palabuhanratu	19
SS 5 Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas PPN Palabuhanratu yang Optimal	20
SS 6 Pengelolaan PPN Palabuhanratu yang Berdaya Saing	20
SS 7 Pengelolaan Kenelayaan yang Maju dan Berdaya Saing di PPN Palabuhanratu	22
SS 8 Tata Kelola Sumber Daya Ikan di WPPNRI Perairan Laut yang Bertanggung Jawab di PPN Palabuhanratu	22
SS 9 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Palabuhanratu	24
3.2 Akuntabilitas Keuangan	28
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	30
4.2 Saran	31
LAMPIRAN DATA DUKUNG KINERJA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Indikator dan Target Kinerja PPN Palabuhanratu Tahun 2023	11
Tabel 2	Komposisi Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2023	12
Tabel 3	Rencana Aksi Indikator Kinerja Tahun 2023	13
Tabel 4	Nilai Pencapaian IKU PPN Palabuhanratu Triwulan I Tahun 2023	16
Tabel 5	Capaian IKU "Volume produksi perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu" Triwulan I Tahun 2023	18
Tabel 6	Capaian IKU "Tingkat operasional PPN Palabuhanratu" Triwulan I Tahun 2023	21
Tabel 7	Capaian IKU "Laporan data logbook penangkapan ikan yang dikumpulkan" Triwulan I Tahun 2023	23
Tabel 8	Capaian IKU " Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PPN Palabuhanratu" Triwulan I Tahun 2023	25
Tabel 9	Rincian Alokasi dan Realisasi Anggaran pada DIPA PPN Palabuhanratu Triwulan I Tahun 2023	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu	5
Gambar 2	Dashboard Aplikasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Triwulan I Tahun Anggaran 2023	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (PPN Palabuhanratu) adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) yang telah melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai tujuan pembangunan perikanan tangkap yakni meningkatkan produksi dan produktivitas usaha perikanan tangkap berbasis pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan nelayan. Lima kegiatan utama yang dilakukan yakni (1) Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan; (2) Pengelolaan Pelabuhan Perikanan; (3) Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan; (4) Pengelolaan Sumber Daya Ikan; dan (5) Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa segala pelaksanaan pembangunan oleh instansi pemerintah agar dilaporkan secara akuntabel sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan meliputi pertanggung jawaban penggunaan anggaran, keberhasilan yang dihasilkan, kegagalan pelaksanaan serta permasalahan – permasalahan yang dihadapi disertai dengan tindak lanjut pelaksanaan di tahun mendatang.

1.2 GAMBARAN UMUM

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu merupakan kawasan terpilih sebagai basis atau sentra pengelolaan perikanan untuk pengembangan ekonomi usaha perikanan yang dikembangkan secara terintegrasi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, pelaku usaha dan masyarakat dengan menciptakan iklim usaha yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi wilayah, penciptaan lapangan kerja dan

pendapatan masyarakat, melalui penataan pusat pelayanan bisnis perikanan yang berfungsi melayani, mendorong, dan memacu pembangunan kawasan perikanan di wilayah Jawa Barat.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu berada di Teluk Palabuhanratu yang merupakan bagian dari perairan Samudera Hindia (WPP-RI 573). Dilatarbelakangi adanya potensi perikanan di sekitar Palabuhanratu, maka dibangunlah Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu pada tahun 1991 – 1993 dengan dana pembangunan pada tahap awal bersumber dari *Asian Development Bank* (ADB) dan *Islamic Development Bank* (IDB) dan pada tanggal 18 Februari 1993 diresmikan operasionalnya oleh Presiden RI.

Pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan empat pilar pembangunan nasional, yaitu *pro-poor* (pengentasan kemiskinan), *pro-job* (penyerapan tenaga kerja), *pro-growth* (pertumbuhan) dan *pro-environment* (pemulihan dan pelestarian lingkungan) sebagai *mainstream* dari pembangunan kelautan dan perikanan mengingat wilayah laut/ pantai dimana kegiatan perikanan berada merupakan sumberdaya anugrah potensial (*potential endowed resources*) yang khas memiliki keterkaitan (*intervedency*) yang kompleks dengan bidang sosial-perekonomian-budaya masyarakat disekitarnya. Kesiapan komponen infrastruktur/ fasilitas/ sarana penangkapan akan sangat diperlukan dalam rangka mengoptimalkan kegiatan eksploitasi sumberdaya tersebut.

1.3 KEDUDUKAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap, Pelabuhan Perikanan adalah unit pelaksana teknis di bidang Pelabuhan perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Dasar hukum pengelolaan Pelabuhan perikanan antara lain:

- Undang – Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Tahun 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 1983 tentang Pembinaan Kepelabuhan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhan Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.4 TUGAS DAN FUNGSI

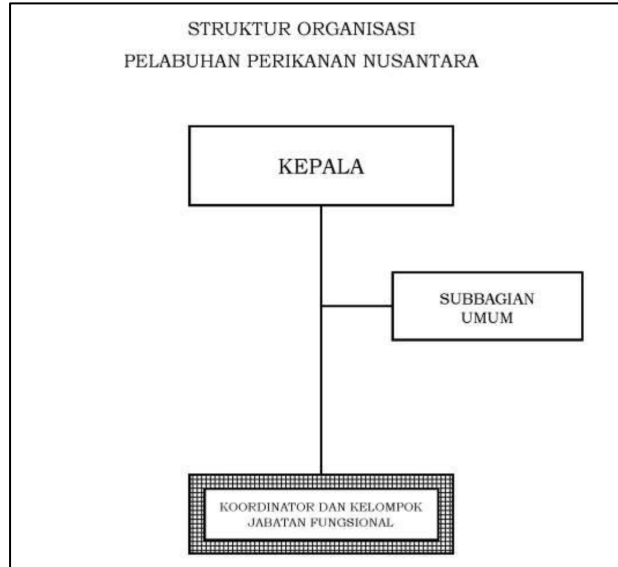
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap, bahwa Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pelabuhan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang Pelabuhan perikanan;
- b. Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan perikanan;
- c. Pelaksanaan pelayanan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
- d. Pelaksanaan pemeriksaan *logbook* penangkapan ikan;
- e. Pelaksanaan pelayanan penerbitan persetujuan berlayar;
- f. Pelaksanaan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan;
- g. Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;

- h. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan pengawasan, serta pengendalian sarana dan prasarana;
- i. Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan dan pemasaran serta distribusi hasil perikanan;
- j. Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha;
- k. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan publikasi;
- l. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik;
- m. Pelaksanaan inspeksi pengendalian mutu hasil perikanan pada kegiatan penangkapan ikan;
- n. Pelaksanaan pengendalian lingkungan di Pelabuhan perikanan; dan
- o. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Adapun susunan organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap terdiri dari:

- a. Subbagian Umum. Subbagian umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu

Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dengan struktur organisasinya berkewajiban memberikan kinerja yang terbaik bagi perwujudan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan yang di implementasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dievaluasikan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.5 ASPEK STRATEGIS

Aspek Strategis Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dalam mendukung kebijakan pembangunan perikanan tangkap Tahun 2020 – 2024 sesuai dengan renstra DJPT adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya pengelolaan perikanan tangkap yang partisipatif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan;
- b. Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan perikanan tangkap di Pelabuhan perikanan yang adil, berdaya saing, dan berkelanjutan;
- c. Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yang kompeten, professional, dan berintegritas;

- d. Terwujudnya pengelolaan perikanan tangkap yang partisipatif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan; dan
- e. Terkelolanya anggaran pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu secara efisien dan akuntabel.

1.6 SISTEMATIK PENYAJIAN

Penyusunan LKj 2023 merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi suatu organisasi yang transparan dan sebagai alat kendali serta pemacu peningkatan kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini disajikan informasi umum tentang LKj yang menjadi tanggung jawab sebuah instansi pemerintah, penjelasan secara umum suatu organisasi serta bagan organisasi dan informasi tentang alur capaian kinerja yang meliputi perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja selama kurun waktu triwulan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini menguraikan secara singkat mengenai visi, misi, dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM/ Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Renja) dan Penetapan Kinerja (PK).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini menguraikan pembahasan IKU sesuai dengan *Balanced Score Card* (BSC). Memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis

akuntabilitas kinerja, yang diuraikan secara sistematis serta membandingkan data kinerja, keberhasilan/ kegagalan, hambatan/ kendala, permasalahan yang dihadapi serta langkah – langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan juga akuntabilitas keuangan yang menyajikan rencana dan reallisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas – tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/ tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis serta strategis pemecahan masalah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU 2021 – 2024

Sesuai dengan visi pembangunan kelautan dan perikanan untuk mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumber daya kelautan serta perikanan yang berkelanjutan Visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yakni mewujudkan Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Mandiri dan Sejahtera yang tertuang dalam Renstra DJPT Tahun 2020 – 2024, Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu menetapkan visi, misi, rencana strategis, tujuan, dan sasaran strategis yang terukur dan dilaksanakan setiap tahun. Adapun visi misi, tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu, yaitu:

VISI

Dengan mempertimbangkan dan merupakan penjabaran visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka Visi Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Tahun 2020 – 2024 adalah **“Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu sebagai Pusat Pertumbuhan dan Pengembangan Ekonomi Perikanan Terpadu”**

MISI

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan tugas dan fungsi Pelabuhan Perikanan serta peluang perubahan sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis, maka Misi yang diemban Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu adalah:

- a. Menyediakan fasilitas dan jasa yang berorientasi pada tingkat pertumbuhan usaha perikanan;
- b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan;
- c. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha;

- d. Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); dan
- e. Menciptakan iklim usaha yang kondusif

2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu mencakup berbagai aspek baik yang langsung dikelola oleh pelabuhan sendiri maupun dikelola oleh institusi/ Lembaga lain yang beraktifitas di dalam Pelabuhan, sehingga penetapan visi tersebut dengan tujuan/ harapan mampu mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pelabuhan perikanan dalam memberikan pelayanan yang bermutu, menuju sasaran yang ingin dicapai dan menjadi acuan serta memberikan inspirasi dan motivasi kerja bagi organisasi.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Sasaran strategis Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu berdasarkan tujuan yang akan dicapai dengan masing-masing IKU sebagai berikut:

1. Sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah “**Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Palabuhanratu**”, dengan indikator kinerja: Penerimaan PNBP di PPN palabuhanratu;
2. Sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah “**Produktivitas Perikanan Tangkap di PPN Palabuhanratu Meningkat**”, dengan indikator kinerja: Volume produksi perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu;
3. Sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah “**Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berdaya Saing di PPN Palabuhanratu**”, dengan indikator kinerja: Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan;

4. Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah **“Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/ Terlindungi di PPN Palabuhanratu”**, dengan indikator kinerja:
 - a. Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan;
 - b. Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan;
5. Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah **“Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas PPN Palabuhanratu yang Optimal”**, dengan indikator kinerja: Pelabuhan perikanan yang ditingkatkan fasilitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur;
6. Sasaran strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai adalah **“Pengelolaan PPN Palabuhanratu yang Berdaya Saing”**, dengan indikator kinerja:
 - a. Tingkat operasional PPN Palabuhanratu;
 - b. Pelabuhan perikanan yang dikelola dan dianalisis pendataannya;
7. Sasaran strategis ketujuh (SS-7) yang akan dicapai adalah **“Pengelolaan Kenelayan yang Maju dan Berdaya Saing di PPN Palabuhanratu”**, dengan indikator kinerja: Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya;
8. Sasaran strategis kedelapan (SS-8) yang akan dicapai adalah **“Tata Kelola Sumber Daya Ikan di WPPNRI Perairan Laut yang Bertanggung Jawab di PPN Palabuhanratu”**, dengan indikator kinerja: Laporan data logbook penangkapan ikan yang dikumpulkan;
9. Sasaran strategis kesembilan (SS-9) yang akan dicapai adalah **“Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Palabuhanratu”**, dengan indikator kinerja:
 - a. Nilai PM pembangunan ZI PPN Palabuhanratu;
 - b. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PPN Palabuhanratu;
 - c. Nilai rekonsiliasi kinerja PPN Palabuhanratu;
 - d. IP ASN PPN Palabuhanratu;
 - e. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/ jasa PPN Palabuhanratu;
 - f. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN PPN Palabuhanratu;

- g. Nilai IKPA PPN Palabuhanratu;
- h. Nilai kinerja anggaran PPN Palabuhanratu.

2.3 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pembangunan perikanan tangkap secara terukur, Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu telah menetapkan target – target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merujuk pada IKU Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Target – target tersebut tertuang pada Perjanjian Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Tahun 2023 sebagai dengan tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Indikator dan Target Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Palabuhanratu	1	Penerimaan PNBP di PPN Palabuhanratu (Rp. Juta)	995,63
2	Produktivitas Perikanan Tangkap di PPN Palabuhanratu Meningkat	2	Volume produksi perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu (Ton)	4.250
3	Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berdaya Saing di PPN Palabuhanratu	3	Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan (Produk)	50
4	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di PPN Palabuhanratu	4	Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan (Produk)	1
		5	Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan (Orang)	30
5	Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas PPN Palabuhanratu yang Optimal	6	Pelabuhan perikanan yang ditingkatkan fasilitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur (Unit)	1
6	Pengelolaan PPN Palabuhanratu yang Berdaya Saing	7	Tingkat operasional PPN Palabuhanratu (Nilai)	83
		8	Pelabuhan perikanan yang dikelola dan dianalisis pendataannya (Lembaga)	1
7	Pengelolaan Kenelayanan yang Maju dan Berdaya Saing di PPN Palabuhanratu	9	Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya (Orang)	20
8	Tata Kelola Sumber Daya Ikan di WPPNRI Perairan Laut yang Bertanggung Jawab di PPN Palabuhanratu	10	Laporan data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan (Laporan)	300
9	Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan PPN Palabuhanratu	11	Nilai PM pembangunan ZI PPN Palabuhanratu (Nilai)	75,07

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
		12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PPN Palabuhanratu (%)	75
		13	Nilai rekonsiliasi kinerja PPN Palabuhanratu (Nilai)	93
		14	IP ASN PPN Palabuhanratu (Indeks)	80
		15	Tingkat kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa PPN Palabuhanratu (%)	77,5
		16	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN PPN Palabuhanratu (%)	77,5
		17	Nilai IKPA PPN Palabuhanratu (Nilai)	89
		18	Nilai Kinerja Anggaran PPN Palabuhanratu (Nilai)	82

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 17.349.747.000,-

Tabel 2. Komposisi Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2023

NO	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	326 200 000
2	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	2.628.159.000
3	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	4.000.000
4	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	28.140.000
5	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	14.363.248.000
JUMLAH		17.349.747.000

2.4 RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA

Rencana aksi penetapan kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari target – target yang telah disusun dan ditetapkan pada dokumen penetapan kinerja. Dokumen rencana aksi digunakan sebagai alat monitor secara berkala (triwulan) terhadap pencapaian indikator *output* dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dilakukan upaya – upaya tindak lanjut guna mengeliminir permasalahan pada triwulan berikutnya. Rencana aksi penetapan kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI
1	Penerimaan PNBP di PPN Palabuhanratu (Rp.Juta)	Sosialisasi Dan Monev Pengguna Jasa Di Pelabuhan Perikanan Sarana Pendukung Pemungutan PNBP Pasca Produksi
2	Volume produksi perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu (Ton)	Penyediaan Petugas Pendataan Produksi Ikan di Pelabuhan Perikanan Monitoring dan Evaluasi Hasil Tangkapan Ikan (Perjalanan Dinas Dalam Rangka Menghadiri Undangan Terkait Pendataan & Baju Petugas Pendataan) Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Layanan Data Statistik Kelautan dan Perikanan
3	Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan (Produk)	Pelaksanaan pemeriksaan kelaikan/ pengukuran/ pengujian/ inspeksi kapal perikanan
4	Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan (Produk)	Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN)
5	Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan (Orang)	Sosialisasi dan Asistensi Pelayanan Buku Pelaut bagi Awak Kapal Perikanan dan E-PKL (Pelaksanaan Dalam Kantor/Balai Nelayan/Pemerintah)
6	Pelabuhan perikanan yang ditingkatkan fasilitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur (Unit)	Fasilitas Pendukung PNBP Pasca Produksi Pengadaan Fender Dermaga
7	Tingkat operasional PPN Palabuhanratu (%)	Tata Kelola Dan Operasional Kesyahbandaran Operasional Kesyahbandaran Di Pelabuhan Binaan Ujung Genteng Operasional Kesyahbandaran Di Pelabuhan Binaan Ciselok Desimilasi Regulasi Kesyahbandaran dan Aplikasi Teman SPB Di Pelabuhan Perikanan Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan PNBP Pasca Produksi Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kesyahbandaran Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan PNBP Pasca Produksi Evaluasi Pelaksanaan SOP Pelayanan Publik Di Pelabuhan Pengelolaan Dan Operasional Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) Di Pelabuhan Perikanan Desiminasi Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) Dan Penerapan Lembar Awal Di Pelabuhan Perikanan Bimtek Dan Pembinaan Cara Penanganan Ikan Yang Baik Di Pelabuhan Operasional Inspeksi Pengendalian Mutu Di Pelabuhan Perikanan Pelayanan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan Sarana Penunjang Pengusahaan Pelabuhan Pelaksanaa Penataan Dokumen Pelayanan Pelabuhan Perikanan Peningkatan Kompetensi Petugas Pelayanan Honor Tim Pengendali Teknis Operasional K5 Di Pelabuhan Surveillance ISO 14001:2015

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI
		Gerakan Bersih Pelabuhan Bulan Cinta Laut Pelaksanaan tata kelola dan operasional SPDN di pelabuhan perikanan Pengelolaan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan Publikasi Dan Promosi Pelabuhan Perikanan Pelaksanaan Penerbitan SPP PNBP Pasca Produksi Pelaksanaan Pengamanan Terpadu PNBP Pascaproduksi
8	Pelabuhan perikanan yang dikelola dan dianalisis pendataannya (Lembaga)	Bimtek PIPP Ke Pelabuhan Binaan
9	Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya (Orang)	Fasilitasi akses pendanaan usaha nelayan melalui lembaga keuangan (perbankan dan non perbankan)
10	Laporan data logbook penangkapan ikan yang dikumpulkan (Laporan)	Fasilitasi akses pendanaan usaha nelayan melalui lembaga keuangan (perbankan dan non perbankan)
11	Nilai PM pembangunan ZI PPN Palabuhanratu (Nilai)	Forum Konsultasi Publik Dan Pemantauan Pembangunan Zona Integritas Penguatan RB Lingkup PPN Palabuhanratu
12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PPN Palabuhanratu (%)	
13	Nilai rekonsiliasi kinerja PPN Palabuhanratu (Nilai)	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Ditjen Perikanan Tangkap Pengelolaan Kinerja Lingkup PPN Palabuhanratu
14	IP ASN PPN Palabuhanratu (Indeks)	Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Dan Penerapan Disiplin Pegawai
15	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/ jasa PPN Palabuhanratu (%)	
16	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN PPN Palabuhanratu (%)	
17	Nilai IKPA PPN Palabuhanratu (Nilai)	Pembayaran gaji dan tunjangan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK Operasional dan Pemeliharaan Kantor Langganan Daya dan Jasa Pemeliharaan Kantor Pelayanan Terkait Operasional Satker Langganan Jasa Lainnya Pengadaan Sarana Perkantoran
18	Nilai kinerja anggaran PPN Palabuhanratu (Nilai)	Implementasi PIPK dan SPIP Lingkup PPN Palabuhanratu Penyusunan Laporan Keuangan dan Rekonsiliasi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Pelaksanaan kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu pada tahun 2023 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) mendukung pembangunan perikanan melalui 9 (sembilan) sasaran kinerja dan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja. Metode pengukuran kinerja di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu menggunakan aplikasi www.kinerjaku.kkp.go.id Hasil pengukuran kinerja kemudian dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. Berdasarkan Perjanjian Kinerja tersebut, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala dengan tampilan *dashboard* capaian Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu triwulan I tahun 2023 seperti pada gambar 2.



Gambar 2. Dashboard Aplikasi Kinerjaku Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Triwulan I Tahun Anggaran 2023

Capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu memperoleh rata – rata Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Triwulan I Tahun 2023 sebesar 113,67% dan termasuk dalam kategori “**Istimewa**” (110 – 120). Adapun rincian tabulasi capaian kinerja masing – masing Sasaran Kegiatan dan indikator keberhasilannya dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini.

Tabel 4. Nilai Pencapaian IKU PPN Palabuhanratu Triwulan I Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET		REALISASI	
				2023	TW I	TW I	%
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Palabuhanratu	1	Penerimaan PNBP di PPN Palabuhanratu (Rp. Juta)	995,63	-	-	-
2	Produktivitas Perikanan Tangkap di PPN Palabuhanratu Meningkat	2	Volume produksi perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu (Ton)	4.250	530	704,76	132,97
3	Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berdaya Saing di PPN Palabuhanratu	3	Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan (Produk)	50	-	-	-
4	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/ Terlindungi di PPN Palabuhanratu	4	Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan (Produk)	1	-	-	-
		5	Nelayan/ awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/ kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan (Orang)	30	-	-	-
5	Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas PPN Palabuhanratu yang Optimal	6	Pelabuhan perikanan yang ditingkatkan fasilitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur (Unit)	1	-	-	-
6	Pengelolaan PPN Palabuhanratu yang Berdaya Saing	7	Tingkat operasional PPN Palabuhanratu (Nilai)	83	83	86,25	103,9
		8	Pelabuhan perikanan yang dikelola dan dianalisis pendataannya (Lembaga)	1	-	-	-
7	Pengelolaan Kenelayanan yang Maju dan Berdaya Saing di PPN Palabuhanratu	9	Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya (Orang)	20	-	-	-
8	Tata Kelola Sumber Daya Ikan di WPPNRI Perairan Laut yang Bertanggung Jawab di PPN Palabuhanratu	10	Laporan data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan (Laporan)	300	65	72	110,8
9	Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan PPN Palabuhanratu	11	Nilai PM pembangunan ZI PPN Palabuhanratu (Nilai)	75,07	-	-	-
		12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PPN Palabuhanratu (%)	75	75	100	133,33
		13	Nilai rekonsiliasi kinerja PPN Palabuhanratu (Nilai)	93	-	-	-
		14	IP ASN PPN Palabuhanratu (Indeks)	80	-	-	-
		15	Tingkat kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa PPN Palabuhanratu (%)	77,5	-	-	-
		16	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN PPN Palabuhanratu (%)	77,5	-	-	-

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET		REALISASI	
			2023	TW I	TW I	%
	17	Nilai IKPA PPN Palabuhanratu (Nilai)	89	-	-	-
	18	Nilai Kinerja Anggaran PPN Palabuhanratu (Nilai)	82	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 4 (empat) IKU yang diukur capaiannya pada Triwulan

I. IKU yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Volume produksi perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu;
- b. Tingkat operasional PPN Palabuhanratu;
- c. Laporan data logbook penangkapan ikan yang dikumpulkan; dan
- d. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PPN Palabuhanratu.

SS 1. Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Palabuhanratu

Sasaran strategis - 1 “Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Palabuhanratu” memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yakni Penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu

IKU 1.1 Penerimaan PNBP di PPN Palabuhanratu

Indikator nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu adalah seluruh penerimaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yang merupakan pelaksanaan dari fungsi perusahaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Periode pengukuran indikator ini pada tahun 2023 dilakukan tahunan. Capaian indikator ini sampai dengan triwulan I 2023 terpantau pada angka 313,68 (Rp.Juta) dan dapat dihitung sudah mencapai 31,5% dari target tahunannya.

SS 2. Produktivitas Perikanan Tangkap di PPN Palabuhanratu Meningkat

Sasaran strategis - 2 “Produktivitas Perikanan Tangkap di PPN Palabuhanratu Meningkat” memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yakni Volume produksi perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu.

IKU 2.2 Volume produksi perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu

Indikator ini merupakan indikator jumlah produksi perikanan tangkap yang berasal dari laut yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dengan periode pengukuran triwulanan. Produksi perikanan tangkap dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dilaporkan secara berkala setiap bulan maupun harian.

Tabel 5. Capaian IKU “Volume produksi perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu” Triwulan I Tahun 2023

SS 2		Produktivitas Perikanan Tangkap di PPN Palabuhanratu Meningkat							
IKU 2		Volume produksi perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu							
2022		2023			% Capaian		%	Renstra PPN	
Realisasi		Target		Realisasi			Pertumbuhan	Palabuhanratu	
TW 1	Tahunan	Tahunan	TW 1	TW 1	% TW 1	% Tahunan	TW 1	Target 2024	% TW 1 2023
716	4.179,15	4.250	530	704,76	132,97	16,58	-1,57	4.377,5	16,1
TW 2			TW 2	TW 2	% TW 2	% Tahunan	TW 2		% TW 2 2023
1.577,78			1.700	-	-	-	-		-
TW 3			TW 3	TW 3	% TW 3	% Tahunan	TW 3		% TW 3 2023
3.147,08			3.000	-	-	-	-		-
TW 4			TW 4	TW 4	% TW 4	% Tahunan	TW 4		% TW 4 2023
4.179,15	4.250	-	-	-	-	-			

Perbandingan indikator rata – rata volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu triwulan I tahun 2023 dengan 2022 menunjukkan penurunan sebesar 1,57%. Penurunan disebabkan oleh hal yang tidak dapat dikontrol dan dikendalikan, yakni musim penghujan dan angin kencang yang terjadi pada bulan Januari – Februari 2023. Cuaca buruk tersebut menyebabkan para nelayan tidak dapat melakukan aktifitas penangkapan ikan.

SS 3. Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berdaya Saing di PPN Palabuhanratu

Sasaran strategis - 3 “Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berdaya Saing di PPN Palabuhanratu” memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yakni Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan.

IKU 3.3 Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan

Indikator ini merupakan indikator yang menunjukkan jumlah dokumen kapal perikanan yang berada di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dan pelabuhan binaannya. Perhitungan indikator ini dilakukan dengan menghitung jumlah dokumen kapal perikanan (sertifikat kelaikan kapal) yang diterbitkan oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. Pengukuran indikator ini dilakukan tahunan. Capaian indikator sampai dengan triwulan I 2023 tercatat sebanyak 2 dokumen yang telah diterbitkan atau 4% dari target tahunan yang telah ditetapkan.

SS 4. Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/ Terlindungi di PPN Palabuhanratu

Sasaran strategis - 4 “Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/ Terlindungi di PPN Palabuhanratu” memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yakni Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan dan Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan.

IKU 4.4 Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan

Indikator ini menunjukkan menunjukkan jumlah peningkatan pengetahuan/ kompetensi atas awak kapal perikanan melalui kegiatan pelatihan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. Karena pentingnya seorang nakhoda atau awak kapal perikanan memiliki keahlian dan keterampilan, maka perlu adanya sertifikasi kompetensi sebagai bukti kecakapan nelayan dalam mengoperasikan baik kapal maupun alat penangkapan ikan. Perhitungan capaian indikator ini dilakukan tahunan dan sampai dengan triwulan I 2023 belum terdapat capaian dari indikator ini.

IKU 4.5 Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan

Indikator ini menunjukkan menunjukkan jumlah nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya melalui beberapa kegiatan yang difasilitasi oleh PPN Palabuhanratu. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan pengetahuan/kompetensi nelayan/ awak kapal perikanan yakni kegiatan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan. Perhitungan capaian indikator ini dilakukan tahunan, dan sampai dengan triwulan I 2023 belum terdapat capaian/ realisasinya.

SS 5. Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas PPN Palabuhanratu yang Optimal

Sasaran strategis - 5 “Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas PPN Palabuhanratu yang Optimal” memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yakni Pelabuhan perikanan yang ditingkatkan fasillitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur.

IKU 5.6 Pelabuhan perikanan yang ditingkatkan fasillitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur

Indikator ini menunjukkan jumlah Pelabuhan Perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya guna mendukung operasional dan pelayanan sesuai dengan fungsi Pelabuhan Perikanan. Indikator kinerja ini bentuk kegiatannya berupa pengadaan fender dermaga. Sampai dengan triwulan I, progress yang sudah dilaksanakan adalah pada tahap perencanaan. IKU ini merupakan IKU baru dengan pengukuran tahunan.

SS 6. Pengelolaan PPN Palabuhanratu yang Berdaya Saing

Sasaran strategis - 6 “Pengelolaan PPN Palabuhanratu yang Berdaya Saing” terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yakni Tingkat operasional PPN Palabuhanratu dan Pelabuhan perikanan yang dikelola dan dianalisis pendataannya.

IKU 6.7 Tingkat operasional PPN Palabuhanratu

Indikator kinerja ini merupakan tingkat capaian operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu berdasarkan penilaian kegiatan operasional Pelabuhan

Perikanan sesuai keputusan Dirjen Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan yang ada pada aplikasi PIPP. Sesuai dengan perjanjian kinerja IKU Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu ini dihitung berdasarkan persentase rata – rata capaian operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu melalui aplikasi PIPP. Perhitungan tersebut didasarkan pada tersediannya data dan informasi mengenai kinerja operasional dan terlaksananya kegiatan – kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yang meliputi pengupulan laporan Inspeksi Pembongkaran Ikan, Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), Kegiatan K5, dan PNPB yang diinput pada aplikasi PIPP.

Tabel 6. Capaian IKU "Tingkat operasional PPN Palabuhanratu" Triwulan I Tahun 2023

SS 6		Pengelolaan PPN Palabuhanratu yang Berdaya Saing							
IKU 7		Tingkat operasional PPN Palabuhanratu							
2022		2023			% Capaian		%	Renstra PPN	
Realisasi		Target		Realisasi			Pertumbuhan	Palabuhanratu	
TW 1	Tahunan	Tahunan	TW 1	TW 1	% TW 1	% Tahunan	TW 1	Target 2024	% TW 1 2023
85,5	87,67	83	83	86,25	103,91	103,91	0,88	83	103,91
TW 2			TW 2	TW 2	% TW 2	% Tahunan	TW 2		% TW 2 2023
85,75			83	-	-	-	-		-
TW 3			TW 3	TW 3	% TW 3	% Tahunan	TW 3		% TW 3 2023
91,25			83	-	-	-	-		-
TW 4			TW 4	TW 4	% TW 4	% Tahunan	TW 4		% TW 4 2023
87,67			83	-	-	-	-		-

Capaian indikator tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu menunjukkan angka 86,25 dengan realisasi 103,91% atau kategori kinerja SANGAT BAIK. Hal ini disebabkan oleh pola pendataan yang terintegrasi dengan entri data yang tepat waktu sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain itu, Tim Evkin dapat bekerja sama dengan baik sesuai tugas dan fungsinya, sehingga dapat menyajikan data tepat waktu. Perbandingan indikator tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu pada triwulan I tahun 2023 dan 2022 menunjukkan peningkatan sebesar

0,88%. Hal ini disebabkan oleh pola pendataan yang terintegrasi dengan entri data yang tepat waktu sesuai dengan kondisi di lapangan.

IKU 6.8 Pelabuhan perikanan yang dikelola dan dianalisis pendataannya

Indikator ini menunjukkan menunjukkan jumlah lokasi yang dilakukan pendataan produksi ikan di Pelabuhan Perikanan termasuk lokasi binaan. Indikator kinerja ini bentuk kegiatannya berupa kegiatan Bimbingan teknis PIPP Ke Pelabuhan Binaan. IKU ini merupakan IKU baru dengan pengukuran tahunan.

SS 7. Pengelolaan Kenelayaan yang Maju dan Berdaya Saing di PPN Palabuhanratu

Sasaran strategis - 7 “Pengelolaan Kenelayaan yang Maju dan Berdaya Saing di PPN Palabuhanratu” memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yakni Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya.

IKU 7.9 Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya

Indikator ini diukur berdasarkan jumlah nelayan yang mendapatkan informasi tentang pendanaan usaha nelayan dari Lembaga keuangan (perbankan dan non perbankan) melalui pojok pendanaan nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara palabuhanratu sepanjang Tahun 2023. Data dukung IKU ini berupa daftar nelayan yang mengakses informasi pojok pendanaan nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. IKU ini memiliki periode perhitungan tahunan.

SS 8. Tata Kelola Sumber Daya Ikan di WPPNRI Perairan Laut yang Bertanggung Jawab di PPN Palabuhanratu

Sasaran strategis - 8 “Tata Kelola Sumber Daya Ikan di WPPNRI Perairan Laut yang Bertanggung Jawab di PPN Palabuhanratu” memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yakni Laporan data logbook penangkapan ikan yang dikumpulkan.

IKU 8.10 Laporan data logbook penangkapan ikan yang dikumpulkan

Indikator ini menunjukkan jumlah laporan data logbook penangkapan ikan yang diverifikasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dengan periode

pengukuran triwulanan. Logbook penangkapan ikan adalah laporan harian tertulis nahkoda mengenai kegiatan perikanan dan operasional kapal penangkapan ikan yang merupakan salah satu informasi hasil tangkapan ikan dalam system manajemen penangkapan ikan. Sistem informasi logbook penangkapan ikan adalah salah satu bentuk system pengolahan data perikanan yang dipergunakan dalam proses verifikasi, pengisian data (*data entry*), validasi data, analisis data, dan pengambilan kesimpulan logbook penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan yang telah ditentukan.

Validasi data logbook penangkapan ikan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2014 tentang Logbook Penangkapan Ikan dimana data yang diserahkan adalah lengkap dan benar, yaitu adanya kesesuaian antara alat penangkapan ikan yang digunakan dengan jenis ikan hasil tangkapan dan kesesuaian anatara periode waktu operasi penangkapan ikan dengan jumlah hasil tangkapan. Indikator ini didukung oleh kegiatan pelaksanaan dan pengumpulan data logbook penangkapan ikan.

Tabel 7. Capaian IKU “Laporan data logbook penangkapan ikan yang dikumpulkan” Triwulan I Tahun 2023

SS 8		Tata Kelola Sumber Daya Ikan di WPPNRI Perairan Laut yang Bertanggung Jawab di PPN Palabuhanratu							
IKU 10		Laporan data logbook penangkapan ikan yang dikumpulkan							
2022		2023			% Capaian		%	Renstra PPN	
Realisasi		Target		Realisasi			Pertumbuhan	Palabuhanratu	
TW 1	Tahunan	Tahunan	TW 1	TW 1	% TW 1	% Tahunan	TW 1	Target 2024	% TW 1 2023
57	354	300	65	72	110,77	24	26,31	300	26,31
TW 2			TW 2	TW 2	% TW 2	% Tahunan	TW 2		% TW 2 2023
109			135	-	-	-	-		-
TW 3			TW 3	TW 3	% TW 3	% Tahunan	TW 3		% TW 3 2023
248			220	-	-	-	-		-
TW 4			TW 4	TW 4	% TW 4	% Tahunan	TW 4		% TW 4 2023
354			300	-	-	-	-		-

Target laporan data logbook penangkapan ikan yang dikumpulkan pada triwulan I tahun 2023 sebanyak 65 laporan data logbook dengan capaian sebanyak 72 laporan atau tercapai sebesar 110,77%. Laporan logbook pada bulan februari menunjukkan jumlah yang terbanyak pada triwulan I yakni sebanyak 27 laporan, hal ini disebabkan oleh banyaknya kapal yang kembali setelah melakukan penangkapan ikan.

SS 9. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Palabuhanratu

Sasaran strategis - 9 “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Palabuhanratu” memiliki 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) yakni (1) Nilai PM pembangunan ZI PPN Palabuhanratu; (2) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PPN Palabuhanratu; (3) Nilai rekonsiliasi kinerja PPN Palabuhanratu; (4) IP ASN PPN Palabuhanratu; (5) Tingkat kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa PPN Palabuhanratu; (6) Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN PPN Palabuhanratu; (7) Nilai IKPA PPN Palabuhanratu; dan (8) Nilai kinerja anggaran PPN Palabuhanratu.

IKU 9.11 Nilai PM pembangunan ZI PPN Palabuhanratu

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan percepatan pencapaian sasaaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi khususnya pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme serta peningkatan kualitas pelayanan publik, maka saat ini capaian pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menjadi salah satu IKU pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. Indikator ini dinilai berdasarkan hasil penjumlahan nilai pembangunan ZI menuju WBK pada komponen pengungkit, hasil dan reform yang dihitung secara tahunan.

Pada bulan Februari, PPN Palabuhanratu kedatangan tamu dari tim Inspektorat Jendral KKP dalam rangka pendampingan persiapan penilaian pembangunan Zona Integritas. Dari kegiatan tersebut dilakukan beberapa masukan untuk masukan persiapan pembangunan. Zona Integritas di PPN Palabuhanratu. Hasil dari kegiatan tersebut

memperoleh penilaian sebesar 85,71 atau sebesar 114,28% dari target yang telah ditetapkan.

IKU 9.12 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PPN Palabuhanratu

Indikator ini merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada PPN Palabuhanratu berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh PPN Palabuhanratu yang menjadi objek pengawasan. IKU ini merupakan IKU baru dengan pengukuran triwulanan.

Tabel 8. Capaian IKU "Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PPN Palabuhanratu" Triwulan I Tahun 2023

SS 9		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Palabuhanratu								
IKU 12		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PPN Palabuhanratu								
2022		2023			% Capaian		%	Renstra PPN		
Realisasi		Target	Realisasi				Pertumbuhan	Palabuhanratu		
TW 1	Tahunan	Tahunan	TW 1	TW 1	% TW 1	% Tahunan	TW 1	Target 2024	% TW 1 2023	
-	-	75	75	100	133,33	133,33	-	75	133,33	
TW 2			TW 2	TW 2	% TW 2	% Tahunan	TW 2		% TW 2 2023	
-			75	-	-	-	-		-	-
TW 3			TW 3	TW 3	% TW 3	% Tahunan	TW 3		% TW 3 2023	
-			75	-	-	-	-		-	-
TW 4			TW 4	TW 4	% TW 4	% Tahunan	TW 4		% TW 4 2023	
-			75	-	-	-	-		-	-
-			-	-	-	-	-		-	-

Sehubungan dengan tidak adanya reviu maupun audit dari pada Satker PPN Palabuhanratu selama bulan Januari hingga Maret 2023 (Triwulan I 2023). Sehingga capaian indikator kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PPN Palabuhanratu sebesar 100%.

IKU 9.13 Nilai rekonsiliasi kinerja PPN Palabuhanratu

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Akuntabilitas kinerja yaitu kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Perhitungan indikator nilai rekonsiliasi kinerja PPN Palabuhanratu adalah hasil penilaian atas implementasi SAKIP di PPN Palabuhanratu dengan menggunakan instrumen Kertas Kerja Rekonsiliasi sesuai ketentuan yang berlaku. Perhitungan IKU ini dilakukan pada akhir tahun.

IKU 9.14 IP ASN PPN Palabuhanratu

Indikator ini adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna pengembangan profesionalitas profesi ASN. Angka capaian indikator kinerja ini diperoleh dan diukur oleh Biro SDMAO Kementerian Kelautan dan Perikanan dan dihitung tiap semester dari dashboard pengukuran IP ASN KKP pada laman: <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/unker/250>.

Sampai dengan triwulan I Tahun 2023 diperoleh nilai IP ASN PPN Palabuhanratu di nilai 70,66 dan masih dalam kategori Rendah. Hal ini salah satunya dapat disebabkan oleh belum semua pegawai mengikuti kegiatan pengembangan diri dan atau belum menginput data perolehan sertifikatnya di aplikasi e-pegawai KKP. Capaian ini masih

bisa dikejar di bulan – bulan selanjutnya, mengingat masih banyak kegiatan yang dapat diikuti oleh pegawai PPN Palabuhanratu.

IKU 9.15 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/ jasa PPN Palabuhanratu

Berdasarkan hasil pengawasan BPK RI dan Itjen KKP, diketahui bahwa terdapat beberapa temuan berulang pada unit Eselon I lingkup KKP tiap tahunnya yang terkait dengan pengadaan barang/ jasa, pengelolaan BMN dan kegiatan prioritas/ strategis. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/ jasa, maka dilaksanakan monitoring dalam kepatuhan pengelolaan barang/ jasa sesuai ketentuan yang berlaku (LKE).

IKU ini memiliki periode perhitungan tahunan. Berdasarkan hasil pemantauan progress dari IKU ini diperoleh informasi bahwa sampai dengan triwulan I 2023 sudah melaksanakan kegiatan penguploadan rencana umum pengadaan pada aplikasi SIRUP dan persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE sudah selesai dilaksanakan.

IKU 9.16 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN PPN Palabuhanratu

Indikator ini merupakan indikator kinerja yang menunjukkan tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. IKU ini memiliki periode perhitungan tahunan. Berdasarkan hasil pemantauan capaian hingga triwulan I 2023, maka kegiatan yang telah dilaksanakan adalah pelepasan asset dan penghapusan.

IKU 9.17 Nilai IKPA PPN Palabuhanratu

Indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) PPN Palabuhanratu merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/ Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen

Perbendaharaan yang terintegrasi pada aplikasi Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja. Perhitungan dilakukan tiap Semester. Capaian hingga triwulan I 2023 adalah 66,64.

IKU 9.18 Nilai kinerja anggaran PPN Palabuhanratu

Salah satu instrumen dalam Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) adalah evaluasi kinerja. Evaluasi merupakan salah satu alat yang dapat dipergunakan untuk membuktikan apakah dokumen anggaran telah dilaksanakan sesuai rencana dan untuk umpan balik perbaikan penganggaran pada periode berikutnya. Indikator ini merupakan indikator kinerja yang menunjukkan pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian/ Lembaga atas pelaksanaan RKAKL melalui aplikasi SMART DJA. IKU ini memiliki periode perhitungan tahunan.

3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka pencapaian kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu tahun 2023 telah diperoleh alokasi anggaran dari APBN melalui SP DIPA – 032.03.2.560393/2023 Tanggal 30 November 2022 dengan nilai sebesar Rp.17.349.747.000,- (tujuh belas miliar tiga ratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah). Anggaran tersebut terdiri dari 5 (lima) kegiatan, yaitu:

- a. Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan;
- b. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan;
- c. Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan;
- d. Pengelolaan Sumber Daya Ikan; dan
- e. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

Kelima kegiatan tersebut untuk mendukung sasaran strategis yang sudah ditetapkan dan pencapaian target IKU yang sudah ditetapkan. Secara rinci, anggaran tiap kegiatan yang

diperoleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dan anggaran yang terealisasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 9. Rincian Alokasi dan Realisasi Anggaran pada DIPA PPN Palabuhanratu Triwulan I Tahun 2023

KODE	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	%
2337	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	326 200 000	15.394.744	4,72
2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	2.628.159.000	147.004.556	5,59
2339	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	4.000.000	-	-
2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	28.140.000	-	-
2342	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	14.363.248.000	2.187.532.174	15,23
JUMLAH		17.349.747.000	2.349.931.474	13,54

Dari tabel 9 dapat dijelaskan bahwa total realisasi anggaran sampai triwulan I tahun 2023 yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu sesuai dokumen Perjanjian Kinerja adalah sebesar Rp. 2.349.931.474,- (dua miliar tiga ratus empat puluh Sembilan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) atau sebesar 13,54% dari pagu sebesar Rp. 17.349.747.000,- (tujuh belas miliar tiga ratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Secara umum Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dapat melaksanakan program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap yang terdiri dari beberapa kegiatan yang diimplementasikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu pada tahun 2023. Realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Pelabuhan dengan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, dapat dilihat dari Dashboard Aplikasi Kinerjaku. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu, sebagaimana tercantum dalam dashboard aplikasi Kinerjaku Triwulan I Tahun 2023 yaitu 113,67%.

Terdapat 4 (empat) indikator kinerja di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dengan periode pengukuran triwulan adalah sebagai berikut:

- a. Volume produksi perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu (Ton);
- b. Tingkat operasional PPN Palabuhanratu (%);
- c. Laporan data logbook penangkapan ikan yang dikumpulkan; dan
- d. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PPN Palabuhanratu.

Sedangkan 14 (empat belas) IKU lainnya merupakan IKU dengan periode penilaian secara semesteran dan atau tahunan. IKU tersebut adalah:

- a. Penerimaan PNBPN di PPN Palabuhanratu (Rp.Juta);
- b. Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan (Produk);
- c. Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan (produk);
- d. Nelayan/ awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/ kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan (Orang);
- e. Pelabuhan perikanan yang ditingkatkan fasilitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur (unit);

- f. Pelabuhan perikanan yang dikelola dan dianalisis pendataannya (Lembaga);
- g. Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya (Orang);
- h. Nilai PM pembangunan ZI PPN Palabuhanratu (Nilai);
- i. Nilai rekonsiliasi kinerja PPN Palabuhanratu (Nilai);
- j. IP ASN PPN Palabuhanratu (Indeks);
- k. Tingkat kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa PPN Palabuhanratu (%);
- l. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN PPN Palabuhanratu (%);
- m. Nilai IKPA PPN Palabuhanratu (Nilai); dan
- n. Nilai kinerja anggaran PPN Palabuhanratu (Nilai).

4.2 SARAN

Berdasarkan pembahasan pencapaian indikator kinerja PPN Palabuhanratu Triwulan I 2023 sudah dalam kategori “ISTIMEWA”, hal ini perlu dipertahankan dan bila perlu ditingkatkan lagi.